**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Isu ekonomi maupun perdagangan internasional tidak akan terlepas dengan fenomena globalisasi, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi sendiri merupakan sebuah fenomena yang diawali oleh interaksi ekonomi yang memiliki dampak tidak hanya pada bidang ekonomi tetapi juga bidang politik dan sosial. Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesaling hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik negara modern.[[1]](#footnote-1)

Fenomena globalisasi ekonomi, mengakibatkan terkikisnya hambatan-hambatan yang secara tradisional masih ada, lalu lintas perdagangan barang dan jasa antar negara akan semakin bebas, lalu lintas uang dan investasi dengan aliran modal yang semakin deras keluar masuknya, serta ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak Negara.[[2]](#footnote-2)

Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada di luar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu.[[3]](#footnote-3)

Layaknya isu dalam hubungan internasional lainnya, globalisasi ekonomi pun tidak bisa terlepas dari interaksi isu lain. Sebuah fenomena pasti memiliki kesinambungan dengan fenomena lain, baik dalam konteks sebab akibat ataupun konteks yang berbentuk lain. Dalam kasus ini globalisasi tidak terlepas dari konsep regionalism, dimana dijelaskan bahwa globalisasi ekonomi akan mendorong terbentuknya blok blok ekonomi. Dimana blok ekonomi merupakan bagian dari fenomena regionalism.[[4]](#footnote-4)

Regionalisme dalam pandangan Louise Fawcett merupakan sebuah konstruksi kebijakan negara dan aktor non-negara melalui kerjasama dan koordinasi strategi dalam suatu kawasan.

Tujuan dari regionalisme adalah untuk memperoleh dan mempromosikan tujuan bersama dalam satu ataupun sejumlah isu lainnya[[5]](#footnote-5). Salah satu blok Ekonomi yang menarik untuk dibahas adalah *Asean Economic Community* (AEC) yang juga dikenal sebagai *Masyarakat Ekonomi Asean* (MEA). Kerangka masyarakat Ekonomi Asean sendiri dibuat bersamaan dengan dua pilar Asean Community lainnya, yaitu; *Asean Political Security Community* (APSC) *dan Asean Socio-Cultural Community* (ASCC).

Layaknya kerjasama internasional lainnya, fase-fase kerja sama internasional Asean dibidang ekonomi dibentuk dari tahap awal yaitu *Preferential Trading Agreement* (PTA). PTA ini berfungsi untuk mengurangi besar hambatan baik dalam bentuk tarif dan non tarif atau secara umum dikenal sebagai instrument liberalisasi perdagangan. Menurut Peter Lindert dan Peter Robson PTA merupakan tahap awal dari terbentuknya integrasi ekonomi.[[6]](#footnote-6)

Terkait dengan hal di atas, Negara-negara anggota di ASEAN menyetujui PTA di Manila pada 24 Febuari 1977. Pasca kesepakatan dalam bidang PTA, Asean membentuk kembali kerangka kerjasama dalam bentuk *Free Trade Area (*FTA) yang mulai diberlakukan di tahun 1992. Keberadaan AFTA menjadi pintu yang membuka jalannya liberalisasi perdagangan dengan negara negara lain yang lebih dikenal dengan ASEAN-Mitra Wicara. FTA merupakan tahapan integrasi ekonomi diatas PTA, dimana karakter yang menjadi ciri dari tahapan ini adalah ditiadakannya semua jenis hambatan.[[7]](#footnote-7)

Pasca diberlakukannya AFTA dari tahun 2003, terjadi perkembangan liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN yang semakin berkembang. Hal tersebut mendorong terbangunnya MEA bersama dua pilar lainnya, yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN melalui Bali Concord II di Bali pada bulan Oktober 2003.[[8]](#footnote-8) Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun 2020, tetapi pada KTT ASEAN Ke-12 terjadi perubahan keputusan tentang kapan Masyarakat Ekonomi Asean akan diimplementasikan bersama dua pilar lainnya. Para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community* by 2015. Secara khusus para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan MEA pada tahun 2015 dan mentranformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.[[9]](#footnote-9)

Integrasi ekonomi regional atau kawasan sendiri memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, seperti industri dan investasi antar negara anggota, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan diwilayah tersebut.[[10]](#footnote-10) Dapat dilihat dari tujuan utama terbentuknya integrasi ekonomi regional menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan memberikan dampak positif bagi negara anggota yang terlibat.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian yang terintegrasi dalam penyatuan ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN. Perkembangan dan pengelolaan UMKM yang baik dan benar merupakan salah satu pondasi atau dasar untuk bertumbuhnya UMKM menjadi lebih besar sehingga dapat membantu peningkatan pada perekonomian daerah maupun perekonomian negara. UMKM di Indonesia saat ini bertumbuh sangat pesat dan merupakan salah satu penggerak perekonomian. Namun, belum kuat dan kokohnya pondasi perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus selalu memberdayakan sektor UMKM. Eksistensi UMKM memang tidak diragukan lagi karena terbukti telah mampu berdiri dan bertahan serta menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pada saat krisis ekonomi.[[11]](#footnote-11)

Indonesia memiliki dinamikanya tersendiri dalam bidang ekonomi. Krisis 1998 membuat ekonomi Indonesia terpuruk dalam beberapa waktu, sebelum akhirnya kembali menapaki tangga perbaikan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing yang dilakukan pemerintah berupa perbaikan dan pembangunan berbagai macam infrastruktur baru, membenahi berbagai macam aset negara, peningkatan tenaga kerja yang berkualitas, ketersediaan bahan pangan dan devisa Negara.[[12]](#footnote-12) Krisis telah membuka kembali pandangan pemerintah akan pentingnya menaruh perhatian terhadap sektor UMKM, oleh karenanya pemerintahan sampai saat ini sangat serius dalam pembinaan dan pembentukan UMKM baru di Indonesia, karena pemerintah sadar, bahwa UMKM memberikan peran dan kontribusi yang sangat besar terhadap penyerapan terhadap tenaga kerja.[[13]](#footnote-13)

UMKM di negara ASEAN menghadapi tantangan yang cukup berat, karena persaingan yang semakin ketat. Mengingat belum setaranya kondisi ekonomi di masing-masing negara maka diharapkan setiap negara termasuk Indonesia dapat meningkatkan daya saing agar dapat mengambil manfaat dari liberalisasi.

 Di Indonesia bagian terbesar dari pelaku ekonomi adalah UMKM, kiranya dapat dan perlu dipersiapkan menghadapi era liberalisasi[[14]](#footnote-14). Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus meningkatakan daya saing UMKM. Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya. UMKM ini tergolong kepada sektor riil dalam perekonomian, dimana sektor riil inilah yang memiliki daya tahan yang paling tinggi terhadap krisis global. UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi[[15]](#footnote-15). UMKM memegang peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian suatu negara karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (capital intensive).[[16]](#footnote-16)

 Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.[[17]](#footnote-17)

 Disisi lainnya, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, SDM yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable)*, tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi,[[18]](#footnote-18) keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan.

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.[[19]](#footnote-19)

Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor SDM di dalamnya juga memiliki andil tersendiri.[[20]](#footnote-20) Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan SDM-nya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA dan AEC.

Peningkatan daya saing UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, dengan semakin meningkatnya volume segmen tenaga kerja pada pelaku UMKM, tentunya peningkatan daya saing produk akan tetap terjaga, asalkan pemerintah sebagai pemilik otoritas dalam pengelolaan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan UMKM, benar-benar serius memberikan pelatihan serta peningkatan kualitas SDM pada sektor UMKM. Untuk menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN, tentunya semua segmen harus mendapat perhatian dari pemerintah, namun yang perlu diperhatikan tentu yang terpenting adalah kualitas SDM dari pelaku, karena segmen ini merupakan faktor utama penentu keberhasilan suatu unit usaha dalam meningkatkan daya saing produk dalam menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN.[[21]](#footnote-21)

Bertitik tolak dari uraian diatas, penulis merasa perlu untuk melihat korelasi antara peningkatan daya saing UMKM paca diberlakukannya MEA 2015 dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Bagaimana MEA memiliki kemampuan untuk mendorong perkembangan peningkatan daya saing UMKM Indonesia? terlebih Indonesia merupakan Negara inisiator dari kerjasama kawasan Asia Tenggara ini, sehingga perlu adanya kajian yang mengukur peran MEA di sektor ekonomi Indonesia, Berdasarkan indikator pada penelitian tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul:

 ***“Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”***

* 1. **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka MEA mampu mengembangkan UMKM untuk menghadapi persaingan di era globaslisasi?
2. Bagaimana pengaruh UMKM terhadap prospek arus penyerapan tenaga kerja?
3. Sejauhmana peningkatan daya saing UMKM dalam MEA 2015 mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Indonesia?

**1. Pembatasan Masalah**

Mengingat masalah yang dipaparkan sangat luas, maka untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan di atas, penulis membatasi masalah pada strategi daya saing, peran UMKM dan daya serap tenaga kerja Indonesia pasca diberlakukannya MEA 2015-2016

**2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah dalam menganalisa serta untuk mendapatkan kejelasan yang berdasarkan masalah yang ada. Mengacu pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi daya saing UMKM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia.

* 1. **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

**1. Tujuan Penelitian**

 Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui masalah pada peran UMKM dan strategi daya saing serta daya serap tenaga kerja Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran daya saing UMKM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia.

**2. Adapun kegunaan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:**

a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah: Menambah wawasan tentang kerjasama internasional antara peningkatan daya saing UMKM pasca diberlakukannya MEA 2015 dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia.

b. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah: Hasil penelitian ini, diharapkan berguna bagi setiap pembaca yang tertarik terhadap masalah peningkatan daya saing umkm pasca diberlakukan mea 2015 dan pengaruhnya terhadap tenaga kerja indonesia, sealain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi hubungan internasional dan menjadi referensi tambahan untuk mengkaji permasalahan hubungan internasional secara umum, ataupun permasalahan terkait ekonomi politik internasional secara khusus.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding bagi penelitian penelitian serupa di masa yang akan datang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan penalaran terhadap isu-isu yang diangkat sehingga mampu mengembangkan keahlian dalam mengkaji dan menyeselesaikan sebuah permasalahan.
4. Sebagai prasyarat bagi peneliti untum menyelesaikan Studi Strata S-1 dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Ip) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
	1. **KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

**1. Kerangka Pemikiran**

Dalam menulis karya ilmiah ini diperlukan landasan konseptual untuk mempermudah melakukan penelitian, landasan konseptual ini juga dimaksudkan untuk memperkuat analisa. Landasan ini akan disajikan oleh penulis dalam kerangka berpikir yang bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat-pendapat para pakar ilmu hubungan internasional dan ilmu lain yang memiliki korelasi dengan objek kajian.

Terkait dengan hubungan internasional, J.C. Johari mengemukakan bahwa hubungan internasional adalah “sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku *non* negara (*non state actors)* yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara.”[[22]](#footnote-22)

Interaksi dalam hubungan internasional dilakukan oleh aktor negara maupun *non* negara yang menciptakan perilaku atau aktivitas-aktivitas yang pada akibatnyaakan mempengaruhi setiap negara yang melaksanakannya.

Terkait dengan penelitian ini, proses integrasi kawasan khususnya dibidang ekonomi tidak terlepas dari dua fenomena. Fenomena tersebut adalah globalisasi ekonomi dan regionalisme. Globalisasi ekonomi sendiri berangkat dari interaksi ekonomi itu sendiri, Globalisasi menurut Theodore H dapat diartikan sebagai; *“a process that* *involves both the broadening and deepening of interdependence among societies and states throughout the world.*”[[23]](#footnote-23)

Sedangkan, globalisasi ekonomi sendiri memiliki makna sebagai berikut:

Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu.[[24]](#footnote-24)

Dalam melihat Globalisasi ataupun Globalisasi Ekonomi, Tiga teori dari Ekonomi Politik Internasional melihat fenomena tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. John Baylis dan Steve Smith dalam bukunya mengatakan bahwa *“The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations”,*  perbedaan cara pandang tiga teori tersebut adalah, sebagai berikut;

1. Menurut kaum realis, globalisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia politik, globalisasi membawa pembagian wilayah dunia menjadi nation – states. sedangkan, adanya keterkaitan antara ekonomi dan masyarakat membuat mereka lebih tergantung satu sama lain. Globalisasi mungkin dapat mempengaruhi hidup sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dunia, tetapi pengaruh tersebut tidak melebihi sistem politik internasional.

2. Kaum liberal cenderung melihat globalisasi sebagai produk akhir dari transformasi dunia politik yang telah berjalan lama. Bagi kaum liberal, globalisasi secara fundamental telah mengacaukan politik dunia kaum realis karena globalisasi menunjukkan bahwa negara tidak lagi sebagai aktor sentral seperti dulu. Liberal sangat tertarik dalam revolusi dalam teknologi dan komunikasi yang diwakili oleh globalisasi. Globalisasi meningkatkan keterkaitan ekonomi dan teknologi antara hasil yang dipimpin masyarakat dalam pola yang sangat berbeda dari hubungan politik dunia dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Negara tidak lagi sebagai unit tertutup dan sebagai hasilnya, dunia lebih terlihat seperti hubungan sarang laba-laba (*cobweb*) daripada seperti model hubungan yang dipaparkan negara realisme atau model kelas teori marxisme.

3. Marxisme menilai bahwa globalisasi hanyalah sebuah sandiwara belaka, tidak ada sesuatu yang baru dalam globalisasi, dan globalisasi hanyalah sebuah fase baru dari perkembangan kapitalisme dunia. Pada akhirnya, globalisasi hanyalah sebuah fenomena yang dipimpin oleh negara – negara barat yang pada dasarnya merupakan perkembangan lebih jauh tentang kapitalisme dunia. Bukannya membuat dunia lebih setara, globalisasi memperluas kesenjangan yang ada antara kelas – kelas utama, menengah kebawah, dan masyarakat miskin.[[25]](#footnote-25)

Globalisasi ekonomi dianggap menjadi katalis dari terbentuknya blok blok ekonomi seperti masyarakat ekonomi eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Blok blok ekonomi ini kemudian lebih dikenal dalam istilah regionalism.

Adapun pengertian regionalisme sendiri menurut Louise Fawcett, sebagai berikut: “Regionalism merupakan sebuah konstruksi kebijakan negara dan aktor non-negara melalui kerjasama dan koordinasi strategi dalam suatu kawasan”.[[26]](#footnote-26)

Regionalismtidak hanya kerjasama dalam bidang ekonomi, namun juga dapat berbentuk aliansi militer. Namun keadaan konstelasi global yang menunjukkan pergeseran isu keamanan kearah kesejahteraan, sepertinya memberikan dampak yang mendasar bagi pengertian regionalisme yang semakin menyempit menjadi kerjasama di bidang ekonomi.

Layaknya globalisasi, fenomena regionalisme pun menghasilkan pandangan yang berbeda beda dari tiga teori ekonomi politik internasional. Regionalisme yang berakar dari konsep kerja sama mendorong perbedaan pendekatan pemahaman dari tiga teori tersebut, yakni:

Merkantilisme menilai fenomena fenomena yang mewarnai sub disiplin HI tersebut harus berpijak kepada peran negara dimana negara harus memiliki andil paling besar dalam mengatur isu isu ekonomi, seperti perdagangan internasional. Ekonomi dianggap sebagai alat politik yang fungsinya suatu dasar bagi kekuasaan politik.[[27]](#footnote-27)

Sehingga proses regionalisasi atau regionalism merupakan alat politik suatu Negara untuk memperkuat kapabilitas power suatu Negara.

Neo-Liberal beranggapan lain, dimana teori ini menekan bahwa bidang ekonomi harus dibiarkan secara mandiri. Secara tegas kaum ekonomi liberal menolak teori dan kebijakan yang mensubordinat ekonomi pada politik. Adam Smit meyakini bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia. Neo-liberal menilai positif regionalism karena mendorong keterbukaan teknologi informasi sehingga mengintegrasikan sektor sosial dan ekonomi yang mampu bersaing dalam kancah Internasional dan tercapai suatu kerjasama dengan cara berkorporasi dengan baik.

Teori ketiga yaitu Marxisme, cenderung membahas permasalahan dari sisi lain fenomena ekonomi politik internasional. Jika dua teori sebelumnya, menekankan pada peran siapa yang lebih penting. Marxisme justru menekankan pada konteks social yang berdasarkan Wallerstein menghasilkan hirarki dari wilayah core, semi periphery dan periphery.[[28]](#footnote-28)

 Selain tiga perbedaan pandangan dari teori tersebut, regionalisme tidak bisa dilepaskan dari teori fungsionalisme yang dapat dikatakan sangat menopang tumbuhnya kerja sama kawasan. Teori fungsionalisme berakar pada Liberal Institusionalisme atau Neo-Liberal.[[29]](#footnote-29) Teori Fungsionalisme ini kemudian dikoreksi dan melahirkan teori baru yang dikenal sebagai Teori Neo-fungsionalisme. Teori ini menekankan pada peran institusi dan bagaimana negara memiliki andil besar dalam pembentukan dan kinerja sebuah institusi.[[30]](#footnote-30)

Pada hakikatnya terbentuknya suatu proses regionalisme tidak terlepas misi utama didirikannya bentuk kerjasama ini. Misi utama dalam regionalism adalah tercapainya sebuah proses yang dikenal dengan integrasi. Integrasi sendiri menurut T. Balassamemiliki pengertian sebagai berikut: “Integrasi merupakan bentuk penghapusan diskriminasi serta kebebasan bertransaksi (integrasi negative) dan sebagai bentuk penyerahan kebijakan kepada lembaga bersama (integrasi positif)”.[[31]](#footnote-31)

Dari pengertian Integrasi tersebut dapat diketahui, bahwa integrasi bersifat umum tidak hanya meliputi bidang ekonomi, tetapi lebih luas dari itu. Namun, penulis meyakini perlunya pengertian integrasi ekonomi dalam kerangka pemikiran, dikarenakan unit analisa yang hendak dikaji merupakan MEA yang tergolong sebagai integrasi ekonomi kawasan.

Integrasi Ekonomi sendiri memiliki pengertian sebagai berikut:

Integrasi ekonomi adalah rancangan dan implementasi serangkaian kebijakan khusus antar kelompok negara dalam region yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran barang maupun faktor produksi antar negara anggota. Integrasi ekonomi yang terbentuk meliputi integrasi perdagangan dan integrasi moneter.[[32]](#footnote-32)

Proses Integrasi Kawasan sendiri menurut Peter Lindert dan Peter Robson tergolong dalam 5 klasifikasi,yaitu:

1. *PTA atau Preferentil Trading Agreement*
2. *FTA atau Free Trade Area*
3. *CU atau Custom Union*
4. *CM atau Common Market*
5. *EU atau Economic Union[[33]](#footnote-33)*

Alasan keberadaan suatu kerjasama regional dibentuk berdasarkan beberapa faktor[[34]](#footnote-34), yakni:

1. Faktor Politik
2. Faktor Budaya
3. Faktor Ekonomi
4. Faktor Geografis

 Untuk dapat mengetahui lebih jelasnya liat gambar dibawah ini:

 Gambar 1 : Faktor Pembentukan Kerjasama Ekonomi Regional

Sumber gambar: Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif hukum dan Globalisasi* (jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 151.

Dalam tahapan atau proses regionalisme tersebut tentunya merupakan hasil dari interaksi yang meliputi semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial, juga budaya. Regionalisme di suatu kawasan dapat diasumsikan dengan ukuran tingginya tingkat interdependensi masyarakat antar negara didalamnya yang mengarah pada dimensi ekonomi sebagai upaya memenuhi kebutuhannya.

Namun menurut Umar Suryadi Bakry ada cara berbeda dalam mengklasifikasi bentuk integrasi ekonomi regional. Klasifikasi tersebut didasari berdasarkan jenisnya dan suatu fenomena integrasi bias terjadi tanpa jenis integrasi lainnya. Dalam kata lain klasifikasi integrasi ini lebih luwes daripada teori proses integrasi dari Peter Lindert dan Peter Robson. Klasifikasi jenis integrasi tersebut diantara lain,yaitu:

1. Pasar produk atau integrasi perdagangan.
2. Integrasi pasar tenaga kerja.
3. Integrasi pasar modal.
4. Integrasi moneter.
5. Integrasi kegiatan dan peraturan pemerintah.[[35]](#footnote-35)

Tujuan utama integrasi ekonomi adalah untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, seperti industri dan investasi antar Negara anggota yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut.[[36]](#footnote-36)

Jika dikaitkan dengan integrasi Ekonomi Kawasan di ASEAN atau yang berada dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean. Integrasi ini memiliki empat tujuan utama adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintasbarang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.[[37]](#footnote-37)

Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebagai berikut:

MEA merupakan suatu program bagi negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan agar menjadi sebuah akses yang lebih mudah seperti menerapkan penghapusan bea masuk (*Free Trade Area*) untuk mewujudkan sebuah pasar tunggal.[[38]](#footnote-38)

Tujuan lain dari MEA adalah untuk tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan. Bentuk integrasi yang dibentuk atau diciptakan oleh ASEAN yaitu integrasi ekonomi melalui MEA*.* Terdapat tiga dimensi penting yang terkait dengan pembentukan integrasi ekonomi, yaitu sebagai berikut: 1) Melalui migrasi manusia: 2) Perdagangan barang dan jasa: 3) Pergerakan modal dan pasar keuangan.[[39]](#footnote-39)

Munculnya integrasi ekonomi kawasan sebagaimana dikemukakan oleh Mitrany, bahwa: “awalnya kerjasama antara negara-negara biasanya dilakukan dalam area-area teknis ketika mereka merasa cocok satu sama lain, tetapi sekali berhasil kerjasama itu dapat ‘menjalar’ kedalam area-area fungsional yang lain ketika negara-negara tersebut menemukan bahwa keuntungan bersama dapat diperoleh.”[[40]](#footnote-40)

Ketergantungan akan menggantikan persaingan nasional, tindakan penyerangan sepihak, dan saling balas dendam yang merajalela dimana-mana. pasar bebas dan penghapusan berbagai rintangan perdagangan merupakan jantung ketergantungan modern.[[41]](#footnote-41)

Penjelasan mengenai pasar bebas Robert Gilpin menyatakan bahwa “Ekonomi pasar pada hakikatnya merupakan sistem dimana unit-unit (negara-negara) yang ada didalamnya memiliki ketergantungan satu sama lain. Sistem itu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan kompetisi antara produsen dan konsumen.”[[42]](#footnote-42)

Aspek ekonomi menjadi penting karena menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan manusia, maka negara-negara lebih melihat kerjasama ekonomi sebagai sesuatu yang menguntungkan. Karenanya tidak heran jika bermunculan kerjasama ekonomi regional yang dijadikan sebagai wadah bagi negara-negara untuk ‘menggairahkan’ perekonomian domestik mereka.[[43]](#footnote-43)

Robert Gilpin mendefinisikan liberalisme, yaitu “sebagai sebuah doktrin atau seperangkat prinsip untuk mengatur dan ­*me-manage* suatu ekonomi pasar sehingga tercapai efesiensi maksimum, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu”. Semua bentuk itu didasarkan atas kepercayaan terhadap pasar dan mekanisme harga sebagai sarana yang paling tepat untuk mengorganisir hubungan ekonomi internasional maupun kegiatan ekonomi domestik. Dalam prinsipnya, sebuah ekonomi internasional diatur oleh hukum permintaan yang intinya, orang akan membeli barang lebih banyak jika harga murah dan lebih sedikit jika harga naik. Selain itu, orang juga akan membeli barang lebih banyak jika pendapatan tinggi dan lebih sedikit jika pendapatan rendah.[[44]](#footnote-44)

liberalisme pasar mengartikan bahwa praktik ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada interaksi pasar. Interaksi pasar yang dinamis akibat arus investasi dan modal yang besar mengakibatkan unsur modal (kapital) menjadi hal yang sangat vital. Melalui mekanisme pasar bebas, maka kaum pemilik modal menjadi sangat dibutuhkan demi kelangsungan pembangunan ekonomi di sebuah negara. Hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam tatanan ekonomi internasional. Arus investasi dan modal merupakan hasil pertemuan dari kepentingan pebisnis untuk mencari keuntungan ekonomi – dan kepentingan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

 Dari definisi di atas menjelaskan bahwa ekonomi pasar adalah adanya kebebasan barang, produk, dan jasa yang diserahkan kepada transaksi pasar. Kebijakan pasar diyakini sebagai jalan bagi negara-negara untuk menjaga perdamaian. hal tersebut senada dinyatakan oleh Cobden bahwa “Pasar bebas adalah abadi dalam kebenarannya dan universal dalam aplikasinya. Pasar bebas merupakan kunci menuju keharmonisan dan perdamaian global; keberhasilan pasar bebas adalah sebuah kemenangan prinsip-prinsip ketentraman antara semua bangsa di dunia.”[[45]](#footnote-45)

 Sebuah karakter pokok dari ekonomi pasar adalah ketergantungannya pada tingkat keterbukaan *(openness)* dan intensitas kompetisi antara para penjual dan pembeli. Artinya, sebuah ekonomi pasar dapat dikatakan sempurna jika sistem itu terbuka bagi semua penjual dan pembeli potensial, dimana tidak ada penjual maupun pembeli yang dapat menentukan *term id exchange.* Prinsip keterbukaan dan kompetensi menuntut adanya suatu mekanisme dimana proses produksi, distribusi, dan penetapan harga-harga tidak dapat dikontrol oleh pihak-pihak tertentu.[[46]](#footnote-46)

 Liberalisme sadar bahwa kemajuan ekonomi tidak seragam (baik pada ekonomi domestik ataupun ekonomi internasional), mereka percaya bahwa dalam jangka panjang, operasi kekuatan pasar mengarah pada persamaan tingkat ekonomi, upah riil, dan harga-harga diantara negara-negara dan kawasan. Mereka menemukan kendala mendasar terhadap pembangunan ekonomi negara kurang berkembang yang muncul dari negara-negara itu sendiri. Besarnya kehidupan pertanian, kurangnya pendidikan teknik, keinginan menabung yang rendah, sistem finansial yang lemah, dan yang terpenting kebijakan pemerintah yang tidak efisien. Apabila hambatan tersebut dihilangkan, dan pasar dapat mulai berfungsi secara efisien, maka ekonomi akan dapat lepas dari keterbelakangan.[[47]](#footnote-47)

 Hirschman dalam bukunya *Essay in Trepassing: Economic to Politics and Beyond* (1981), menyebutkan bahwa:

Masyarakat tidak lagi memandang masalah kemiskinan sebagai persoalan alamiah atau kutukan tuhan atau karena nasib ataupun karena karma seseorang. Orang-orang pada umumnya percaya bahwa kemiskinan dengan konsekuensinya itu dibuat oleh manusia, sehingga kondisi-kondisi demikian menjadi tidak dapat diterima lagi pada masa kini. Kemajuan dan pengaruh yang dicontohkan dari negara-negara berkembang serta telah jauhnya kemajuan negara-negara lain, telah meningkatnya kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu nasib yang tidak dapat diterima.[[48]](#footnote-48)

 MEAsebagai jalan perdagangan bebas di kawasan Asia Tanggara telah berupaya menghapus atau mengurangi hambatan bagi arus lalu lintas barang. Akan tetapi upaya serta persiapan dalam meraih kesempatannya dikembalikan pada negara anggota masing-masing. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Arthur Lewis bahwa: “Ekonomi manapun dapat berkembang apabila memiliki tiga rumusan sederhana: curah hujan yang mencukupi, sistem pendidikan sekunder, dan pemerintah yang berpikiran sehat.”[[49]](#footnote-49)

 Dalam hal ini, negara bukan sebagai penghambat bagi perdagangan bebas, tetapi berfungsi untuk memfasilitasi dan menjamin ketertiban pelaksanaan perdagangan bebas dengan memperbaiki birokrasi, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan perbaikan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Seperti yang dikatakan Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* menyatakan bahwa: “Mengapa masyarakat tertentu dapat mengatasi halangan pembangunan, mentransformasikan diri mereka menjadi kaya melalui adapatasi terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Jawabannya adalah, bahwa masyarakat yang berhasil ini telah membiarkan pasar untuk berkembang tanpa adanya campur tangan politik.”[[50]](#footnote-50)

 Mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara Walt Whitman Rostow, dalam bukunya *The Stages of Economic Growth: A Non Comunist Manifesto* (1960/1962). Menurut pandangannya pertumbuhan ekonomi di dunia adalah suatu kelanjutan dari industrialisasi yang dicanangkan negara-negara kaya dan industri maju. Namun demikian, bagi negara-negara kurang berkembang proses pertumbuhannya tidak dapat dilakukan secara dramatis sebagaimana terjadi di negara-negara maju yang memang sudah mempunyai basis kekuatan ekonomi dan industri mereka. Dalam hal negara-negara kurang berkembang proses identifikasi posisi pertumbuhan tiap-tiap masyarakat adalah melalui tahapan-tahapan tertentu seiring dengan pendekatan sejarahnya yakni[[51]](#footnote-51):

1. Masyarakat tradisional *(the traditional stage)*
2. Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas *(the pre-condition for take off)*
3. Periode lepas landas *(take off)*
4. Gerak menuju kedewasaan *(the drive to maturity)*
5. Tingkat konsumsi tinggi *(the age of high-mass consumption)*[[52]](#footnote-52)*.*

 Tahapan-tahapan pertumbuhan tersebut merupakan evolusi dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, setiap perkembangan ekonomi tersebut menjadi perhatian dan bergantung pada pengelolaan oleh pemerintah terutama bagi para pelaku usaha yang terlibat didalamnya.

 Bagi pelaku usaha yang terlibat langsung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Joseph Alois Schumpeter dalam buku *Theory of Economic Development,* menyatakan “Faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proese inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau *entrepreneur*

(wiraswasta). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur.”[[53]](#footnote-53)*

 Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi, diantaranya:

1. Memperkenalkan barang-barang baru.
2. Mempertinggi efesien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang.
3. Memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran baru.
4. Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru.
5. Mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefesien kegiatan perusahaan.

Semangat jiwa usaha atau *entrepreneur* sudah seharusnya menjadi naluri bagi para pengusaha di dalam suatu negara, karena manfaat serta pelaku didalam MEAditentukan juga oleh para pelaku usahanya. Semakin maju perusahaan di dalam suatu negara dan menggerakan berbagai sektor , maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat begitu juga dengan pendapatan pemerintah. UMKM bertujuan menumbuh kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional, hal ini mengandung makna bahwa umkm merupakan alat perjuanagan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasarkeadilan bagi pemangku kepentingan.[[54]](#footnote-54) Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[[55]](#footnote-55)

Selain berdasar Undang –undang tersebut diatas, dari sudut perkembangannya UMKM dikelompokan dalam beberapa kriteria, yaitu :

*1. Livelihood Activities,* merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagaikesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

*2. Micro Enterprise,* merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajintetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

*3. Small Dynamic Enterprise,* merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memilikijiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.

*4. Fast Moving Enterprise,* merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwakewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)[[56]](#footnote-56).

Upaya UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, adanya peningkatan daya saing utamanya agar dapat bersaing.

Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* menyebutkan bahwa daya saing adalah “kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relative tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional”. Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya.[[57]](#footnote-57)

Menurut Michael Porter (1990), Daya saing diidentikkan dengan produktivitas dimana tingkat output yang dihasilkan oleh suatu tenaga kerja. Banyak faktor yang mempengaruhi daya saing, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Internal

 a. Penguasaan teknologi yang rendah

b. Rendahnya kepemilikan sertifikasi Internasional atau Nasional (SNI)

2. Faktor Eksternal

1. Kemudahan berusaha

b. Akses permodalan

c. Akses pasar

d. Dukungan infrastruktur

f. Siklus bisnis[[58]](#footnote-58)

Menurut Tambunan, tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional, pada dasarnya amat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif (*comparative advantage)* dan faktor keunggulan kompetitif (*Competitive advantage)*. Lebih lanjut, faktor keenggulan komparatif dapat dianggap sebagai faktor yang bersifat *acquired* atau dapat dikembangkan/ diciptakan.Selain dua faktor tersebut, tingkat daya saing suatu negara sesungguhnya juga dipengaruhi oleh apa yang disebut *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* atau keunggulan daya saing.[[59]](#footnote-59)

Selain itu Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia.

Peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusia agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar serta dapat menyerap tenaga kerja, Menurut Simanjuntak (1998) : “Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja.”[[60]](#footnote-60)

Mulyadi (2006) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah “penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.”[[61]](#footnote-61)

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja serta golongan menganggur dan mencari pekerjaan.

Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai angkatan kerja potensial *(potensial labor force).* Sementara, Kuncoro, 2002. Memiliki pandangan mengenai penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja[[62]](#footnote-62).

Atas dasar uraian teoritik diatas peneliti berasumsi sebagai berikut:

1. Kebijakan dan pengelolaan UMKM yang baik dan benar merupakan salah satu pondasi atau dasar untuk bertumbuhnya UMKM menjadi lebih besar sehingga dapat membantu peningkatan pada perekonomian daerah maupun perekonomian Negara.
2. Peningkatan daya saing UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, dengan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada pelaku UMKM

**2. HIPOTESIS**

 Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah diatas, maka ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

“Jika peningkatan daya saing UMKM pasca diberlakukannya MEA dapat diimplementasikan dengan penguatan rantai nilai antara UMKM dan lembaga-lembaga pendukung, maka akan berimplikasi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja ”.

**3. Oprasional Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empiris dan Analisis)**

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis diatas maka penulis membuat definisi operasional dan indikator sebagai berikut :

Tabel 1 Operasional Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empiris dan Analisis)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam (Teoritis) | Indikator (Empirik) | Verivikasi (Analisis) |
| Variabel BebasJika peningkatan daya saing UMKM pasca diberlakukannya MEA dapat diimplementasikan dengan penguatan rantai nilai antara UMKM dan lembaga-lembaga pendukung. |   1. Pada pertemuan SMEWG ke-22 di Singapura, 27-28 Mei 2008, telah dibahas beberapa hal yang mencakup: pembentukan *common curriculum for entrepreneurship in ASEAN* oleh Indonesia dan Singapura, rencana penyusunan *ASEAN SME White Paper*, implementasi *SME Section* dalam *AEC Blueprint*. Dan kerjasama dengan mitra wicara.2.Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN di sektor UKM lebih difokuskan pada tindak lanjut proyek-proyek peningkatan kapasitas dan daya saing UKM di bawah payung *Vientiane Action Plan* dan ASEAN *Policy Blueprint for* SMEs *Development* (APBSD)2004-2014; kerjasama dengan negara-negara Mitra Wicara. | * Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu *cooperative framework* yang melibatkan secara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping meningkatkan budaya wirausaha, inovasi dan *networking* di kalangan UKM, memberikan fasilitas kepada UKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan serta teknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidang kerjasama strategis dalam pengembangan UKM ASEAN, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Dukungan dalam Bidang Pemasaran; Bantuan dalam Bidang Keuangan; Pengembangan Teknologi; dan Penerapan Kebijakan yang Kondusif.

 Sumber data : [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)* Berkaitan dengan prospek pengembangan UKM di tengah kemajuan kerjasama ekonomi ASEAN. Dari 20 proyek yang disepakati dalam APBSD, sembilan proyek diantaranya telah selesai, tiga sedang berjalan, tujuh dalam persiapan dan satu tidak dapat dilaksanakan.

 Sumber data : [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id) |
| Variabel TerkaitMaka akan berimplikasi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.  | 1. Awal September 2015, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional. Salah satu poin kebijakan tersebut ditujukan bagi pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  | * Pemerintah memberikan fasilitas subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fasilitas tersebut memungkinkan UMKM memperoleh kredit berbunga rendah, dari 22-23 persen menjadi 12 persen. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp30 triliun. Nota Keuangan dalam APBN 2015 menyebutkan alokasi anggaran program KUR bertujuan mendorong kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekspor nonmigas, dan pertumbuhan investasi. Hal ini dalam upayan meningkatkan perekonomian Nasional

Sumbe Sumber data :[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)  |

**4. Skema Kerangka Teoritik**

Globalisasi

ASEAN

Indonesia

UMKM

SDM

Penyerapan Tenaga Kerja

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Tingkat Analisis**

Untuk menetapkan jenis hubungan tingkat analisis harus dilihat dari hubungan antara unit analisis (unit yang dianggap sebagai variabel dependen) dengan unit eksplanasi (unit yang dianggap sebagai variabel independen) ada tiga kelompok analisis yang bisa dilihat dari tiga kemungkinan :

Analisis reduksionis, yaitu unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih rendah dan unit analisanya lebih tinggi.

2) Analisis Korelasionis, yang unit eklsplanasinya dan unit analisanya pada tingkat yang sama.

3) Analisis Induksionis, yang unit analisanya pada tingkat yang lebih rendah dan unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih tinggi.

Tingkat analisis yang penulis ambil yaitu tingkat analisis induksionis. Analisa induksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yang lebih rendah. Dimana daya saing UMKM pasca *MEA 2015* sebagai unit eksplanasi dan Penyerapan tenaga kerja Indonesia sebagai unit analisa.

**2. Meotode penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu terdapat metode yang harus digubakan untuk menemukan jawaban atau cara memecahkan masalah, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dengan tujuan untuk mendeskrispiskan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan sesuatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (fact finding), yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut untuk mencari solusidan kaitan-kaitannya dengan strategi baru. Dengan metode deskriptif ini, peneliti ingin mencari tahu sejauh mana perkembangan penerapan tenaga yang ada di Indonesia sebagai rencana atau pengambilan keputusan dalam peningkatan daya saing UMKM pasca diberlakukannya *MEA 2015*, terlebih mengenai penyerapan tenaga kerja Indonesia.
2. Metode Histori, yaitu metode penelitian yang bermaksud membuat rekontruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintetis bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh, dan perkembangan kejadian yang dapat membantu dengan memberi informasi pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Dengan metode historis ini, peneliti ingin mencari fakta mengenai kesiapan dari awal perkembangan peningkatan daya saing UMKM pasca diberlakukannya MEA 2015 dan mencari sebab penyerapan tenaga kerja Indonesia.

**3. Teknik pengumpulan data**

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research (Studi Kepustakaan). Bahan-bahan kepustakaan yang sesuai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dan meneliti langsung ke lapangan. Penelaah data tersebut didapati juga dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, maupun dari website/internet yang membahas peningkatan daya saing UMKM pasca diberlakukannya MEA 2015 dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia.

* 1. **Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah:

i. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN

 Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110.

ii. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan. Jl Lengkong Besar No.68, Bandung.

iii. Badan perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buahbatu, Bandung. Jawa Barat 40286.

* 1. **Sistematis Penulisan**

Sistematika penulisan ini digunakan sebagai pola kerangka befikir yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana masalah-masalah dirangkai, dikumpulkan dan dipecahkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I** Dalam bab ini berisi ringkasan laporan tugas akhir, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

 **BAB II** Berisi uraian mengenai kerangka MEA sehingga mampu mengembangkan UMKM untuk menghadapi persaingan di era globaslisasi.

**BAB III** Berisi uraian tentang variabel terikat yaitu mengenai prospek arus penyerapan tenaga kerja.

 Bab ini berisi informasi atau uraian mengenai tema dalam variabel terkait.

**BAB IV** Bab ini berisi analisis peningkatan daya saing UMKM dalam MEA 2015 mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Indonesia.

**Bab V** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian. Bab ini merupakan kesimpulan dari data fakta hasil penelitian.

1. . Budi Winarno, *Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi,* hal. 124. [↑](#footnote-ref-1)
2. . Sidratullah, La Ode, 2014. *Pengertian Globalisasi Ekonomi dan Dampaknya*. Online http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-globalisasi-ekonomi-dan.html, diakses tanggal 26 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. . Tulus Tambunan, Dokumen Pengusaha Kadin Brebes Di Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Ancaman, hal 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. . Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional* (Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jayabaya, 1997), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. . Mellino yoga saputra, Pengaruh Pernyataan Atiur Rahman : “Saarc is Not Yet a Community” Terhadap Efektivitas Saarc (Analisis Hybrid-Regionalism), hal 3 dalam [http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43957159/UAS.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1476944723&Signature=PmpM5XdZuWfDOWsOxh4nLRnWW2M%3D&response-content disposition=inline%3B%20filename%3PENGARUH\_PERNYATAAN\_ATIUR\_RAHMAN\_SAARC\_I.pdf](http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43957159/UAS.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1476944723&Signature=PmpM5XdZuWfDOWsOxh4nLRnWW2M%3D&response-content%20disposition=inline%3B%20filename%253PENGARUH_PERNYATAAN_ATIUR_RAHMAN_SAARC_I.pdf), diakses pada 04 januari 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. . Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional*: Suatu Pengantar, hal. 213. [↑](#footnote-ref-6)
7. . *Ibid*  [↑](#footnote-ref-7)
8. . Masyarakat Ekonomi Asean cetak biru. Hal 6 dalam <http://aeccenter.kemendag.go.id/media/176978/cetak-biru-komunitas-ekonomi-asean.pdf>, diakses pada 17 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. . Ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. . Umar Suryadi Bakry, Op.Cit., hal. 213. [↑](#footnote-ref-10)
11. . Hafsah, M.J., 2004, *Upaya Pengembangan UKM*, Infokop Nomor 25 Tahun 2004, Diakses dari http://www.depkop.go.id pada tanggal 8 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-11)
12. . Redaksi,“Melihat Perkembangan Ekonomi Indonesia di Mata Dunia” My Bussiness (Online) dalam <http://www.mybusiness.id/melihat-perkembangan-ekonomi-indonesia-di-mata-dunia/>, diakses oktober 2016 [↑](#footnote-ref-12)
13. . Sartika Tiktik Partomo, Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi: Jakarta : Center For Industry And Sme Studies  Faculty Of Economics University Of Trisakti. 2004 [↑](#footnote-ref-13)
14. . Hafsah, M.J., 2004, *Upaya Pengembangan UKM*, Infokop Nomor 25 Tahun 2004, 40–44. Diakses dari http://www.depkop.go.id pada tanggal 8 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. . Bank Dunia, 2005, “*Mendukung Usaha Kecil dan Menengah*”, *Policy Brief*. Diakses dari http://www.worldbank.or.id pada tanggal 20 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. .Terutama pada penyerapan tenaga kerja Pada tahun 2015, UMKM di Indonesia mampu menyerap 1,3 juta orang atau sebesar 99,9% dari total tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha skala kecil, menengah, dan besar. Menurut Kantor Staf Presiden, Menggerakan Sektor UMKM. Diakses dari <http://ksp.go.id/menggerakkan-sektor-umkm/> pada tanggal 10 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-16)
17. . Sri Susilo, Y., (2007a), *“Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan*

*Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, Eksekutif*, Volume 4, Nomor 2, Agustus

2007, hal. 306 – 313 [↑](#footnote-ref-17)
18. . Sudaryanto dan Hanim,Anifatul. 2002. *Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA)* : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002. [↑](#footnote-ref-18)
19. . Ibid [↑](#footnote-ref-19)
20. . Ishak, Effendi. 2005. *Artikel : Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM.* Yogyakarta : Kedaulatan Rakyat. [↑](#footnote-ref-20)
21. . Peringkat Daya Saing Indonesia 2011 dalam blog Bappenas, <http://www.bappenas.go.id/blog/?p=491> diakses pada tanggal 7 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-21)
22. . Definisi Hubungan Internasional Menurut Para Ahli”, *Dunia Baca.com* (Online), dalam http://duniabaca.com/definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli.html, diakses pada 04November 2016. [↑](#footnote-ref-22)
23. . Cohn, Theodore H. 2003. *Global Political* *Economy: Theory and Practice*. Se-cond Edition. New York: San Fransisco: Longman. [↑](#footnote-ref-23)
24. . Tulus Tambunan, Dokumen Pengusaha Kadin Brebes Di Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Ancaman, hal 1 Dalam <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2498-06022008.pdf>, diakses pada 4 september 2016 [↑](#footnote-ref-24)
25. . Ufhaira Nadhifa *“Globalisasi dalam Hubungan Internasional”* dalam <http://ufaira-nadhifa-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-89571-Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-Globalisasi%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html>, diakses oktober 2016 [↑](#footnote-ref-25)
26. . Mellino yoga saputra,  *op. Cit., hal 3* [↑](#footnote-ref-26)
27. . Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional.* Hal.231. [↑](#footnote-ref-27)
28. . *Ibid,* 242 [↑](#footnote-ref-28)
29. . Nuraeni, S., Silvya, D., Sudirman, A., & Adinugraha, E. (2010). *Regionalisme dalam studi hubungan internasional*. Pustaka Pelajar.. Hal 53 [↑](#footnote-ref-29)
30. . *Ibid* [↑](#footnote-ref-30)
31. . Bab II “Teori Integrasi”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29301/3/Chapter%20II.pdf>, [↑](#footnote-ref-31)
32. . Sholeh, “*Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Aec 2015”,* eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522ISSN 0000-0000, dalam ejournal.hi.fisip-unmul.org, hal 2. [↑](#footnote-ref-32)
33. . Umar Suryadi Bakry. Op.Cit., Hal. 174. [↑](#footnote-ref-33)
34. . Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif hukum dan Globalisasi* (jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 150*.* [↑](#footnote-ref-34)
35. . Umar Suryadi Bakry. Op.Cit., Hal 175. [↑](#footnote-ref-35)
36. . *Ibid* [↑](#footnote-ref-36)
37. . “Piagam ASEAN”, Pasal 1 ayat 5 dalam <http://www.asean.org/storage/images/archive/AC-Indonesia.pdf>, [↑](#footnote-ref-37)
38. . S. Adhitya. “*PERDAGANGAN BEBAS SEKTOR JASA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN”* Dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/52343/3/Chapter%20II.pdf>, [↑](#footnote-ref-38)
39. . Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif hukum dan Globalisasi* (jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 151 [↑](#footnote-ref-39)
40. . *Ibid.,* hlm. 49. [↑](#footnote-ref-40)
41. . Scoot Burchill dan Andrew Linklater, *Op. Cit.,* hlm. 48-49. [↑](#footnote-ref-41)
42. . *Ibid.,* hlm. 20. [↑](#footnote-ref-42)
43. . Nuraeni S., Deasy Silvya, Arifin Sudirman, *Op. Cit.,* hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-43)
44. . Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional* (Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jayabaya, 1997), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-44)
45. *. Ibid.,* hlm. 48. [↑](#footnote-ref-45)
46. *. Ibid.* [↑](#footnote-ref-46)
47. . *Ibid.,* hlm. 81. [↑](#footnote-ref-47)
48. . Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional – Konsep & Teori (Jilid 1)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 77-78. [↑](#footnote-ref-48)
49. . *Ibid.* [↑](#footnote-ref-49)
50. . *Ibid.* [↑](#footnote-ref-50)
51. . *Ibid.,* hlm. 91. [↑](#footnote-ref-51)
52. . Septriani Ajo, “*Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli”,* *Chief’s nano-nano,* 10 Juli 2013, dalam http://ceptt094.blogspot.co.id/2013/07/teori-pertumbuhan-ekonomi-menurut-para.html#axzz3t6uKl7uA, diakses pada 01 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-52)
53. . Putri Intan P., “Pertumbuhan Ekonomi Menurut Schumpeter”, *Wordpress.com,* 15 Juni 2014, dalam http://putrifanda.wordpress.com/2014/06/15/3-5-pertumbuhan-ekonomi-menurut-schumpeter/, diakses pada 01 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-53)
54. . Rio F. Wilantara dkk., Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM : Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA (Bandung : Refika Aditama), hlm 7 [↑](#footnote-ref-54)
55. . *Ibid,* hlm 8 [↑](#footnote-ref-55)
56. . Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti. 2014. *Strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar Bebas ASEAN.* *Jurnal.* ISSN NO : 1978-6522. Diakses pada 12 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-56)
57. . Dimas dan Nenik Woyanti. 2009. “Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta”, *Jurnal*

*Bisnis dan Ekonomi* (JBE), Vol. 16, No. 1, hal. 32-41, Semarang: FakultasEkonomi Diponegoro. [↑](#footnote-ref-57)
58. . Bank Indonesia. 2012. *PBI No 14/22/PBI/2012*. diakses dari www.bi.go.id pada tanggal 24 November 2016. [↑](#footnote-ref-58)
59. . Tambunan, Tulus. 2012. *Pasar Bebas Asean : Peluang, Tantangan dan Ancaman Bagi UMKM di Indonesia*. Jakarta : Kementrian Koperasi dan UMKM. [*www.depkop.go.id*](http://www.depkop.go.id)*,* diakses tanggal 20 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-59)
60. . Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. 2 ed. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. [↑](#footnote-ref-60)
61. . Mulyadi S. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. [↑](#footnote-ref-61)
62. . Kuncoro, Haryo. 2002. “Upah Sistem Bagi Hasil dan P enyerapan Tenaga Kerja”, *Jurnal*

*Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 1, hal. 45-56. [↑](#footnote-ref-62)